BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah- tengah masyarakat yang mungkin ditemukan dikampus, sekaligus sebagai proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang sedang membangun dan mengetahui keberhasilan dan permasalahan yang di hadapi. KKL dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan Misi dan Bobot pendidikan bagi mahasiswa dan untuk mendapat nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi.

Kuliah kerja lapangan ditujukan dengan maksud meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan di dasari dengan Iman dan Taqwa (IMTAK) guna melaksanakan pembangunan dengan tumbuh dan berkembang pesat dewasa ini.

Bagi mahasiswa, kegiatan KKL harus dirasakan sebagai pengalaman belajar yang baru yang tidak di peroleh di dalam kampus, sehingga selesainya KKL mahasiswa akan memiliki wawasan guna bekal hidup dan bersosialisasi di tengah masyarakat pada saat melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan Negara di kemudian hari.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Pemerintahan di era reformasi telah mengalami perubahan di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi di masa pelaksanaan yang secara luas nyata dan bertanggung jawab yang dititik beratkan di daerah Kabupaten/Kota. Salah satunya dengan diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi tersebut memberi daerah kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan Otonomi dari pemerintah pusat kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangukutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah. Penerapan Otonomi Daerah telah membuka peluang bagi Daerah, Provinsi, Daerah Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam membangun daerah guna mengimplementasikan makna Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintahan memiliki hierarkhi wewenang dan garis panduan formal dan informal yang harus dipatuhi oleh pegawai-pegawainya. Hal ini, karena komunikasi menjalankan fungsinya sebagai kontrol yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Aparatur pemerintah sebagai komunikator akan mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat. hal tersebut, muncul pemerintah yang memiliki karakteristik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sebagai pengayom

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

masyarakat sekaligus sebagai motivator, mediator, dan fasilitator pelaksanaan otonomi daerah.

kebijakan merupakan titik pusat interaksi antara perencanaan dan perumusan, kebijakan berawal dari Kultur lisan, kemampuan menulis tangan, sampai dengan pemanfaatan komputer. Alat-alat komunikasi tersebut, ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, baik dalam hal pembuatan program maupun pengaplikasian program tersebut.

Kebijakan dapat memelihara dan menggerakkan dinamika kehidupan dan peradaban umat manusia. Pikiran dan perasaan adalah bentuk dari komunikasi seseorang atau banyak orang. Kebijakan juga dapat mengubah insting menjadi inspirasi dan tempat menyimpan ide bersama, memperkuat perasaan kebersamaan, serta mengubah pikiran menjadi perbuatan.

Kebijakan mencakup berbagai aspek dan unsur-unsur interaksi individu. Hal ini, dapat dijelaskan bahwa abstraksi historis komunikasi memberikan suatu perspektif bahwa pengekangan proses Kebijakan tercermin dari sikap perilaku penguasa, yaitu pemerintah. Pemerintah merupakan pranata yang mengatur aktivitas masyarakat. pranata tersebut terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah negara atau daerah, dan untuk melaksanakan aktivitas tersebut pada intinya dilakukan oleh pejabat dan pegawai pemerintah.

Peraturan Pemerintahan Nomor 98 Tahun 2000 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi,

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

permasalahan, kebutuhan nyata yang tumbuh berkembang di Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota memerlukan ketersediaan informasi mengenai data-data yang berhubungan dengan kualifikasi dan potensi daerah secara tepat dan akurat. Informasi yang tersedia harus diikuti dengan kemampuan aparatur.

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain diatur pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongnya formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil yang keluar karena berhenti atau adanya perluasan organisasi. Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan.
b. Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Sebagai pelaksana Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan dalam keputusan ini sebagai petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.

Dalam keputusan ini yang dimaksud adalah :

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul "**Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur".**

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana komunikasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil kepada para pelamar atau CPNS?
2. Bagaimana sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penerimaan CPNS sesuai dengan PP No 98 Tahun 2000?
3. Bagaimana Struktur Birokrasi dalam penyelenggaraan seleksi CPNS yang dilaksanakan oleh BKPPD?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan KKL

Maksud dari penulis ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil di BKPPD.

Adapun tujuannya adalah :

1. Mengetahui komunikasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil kepada para pelamar atau CPNS.
2. Mengetahui sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penerimaan CPNS sesuai dengan PP No 98 Tahun 2000.
3. Mengetahui Struktur Birokrasi dalam penyelenggaraan seleksi CPNS yang dilaksanakan oleh BKPPD.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

1.4 Kegunaan Laporan KKL

Hasil laporan kkl ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi penulis, dengan adanya laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan hasil laporan ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Kegunaan teoritis (guna ilmiah), hasil laporan kkl ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan khususnya bagi Ilmu Pemerintahan sehingga hasil laporan kkl ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi laporan-laporan selanjutnya.
3. Kegunaan praktis, hasil laporan kkl ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Cianjur khususnya Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah dalam penerapan PP No. 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil.

1.5 Kerangka Pemikiran

Secara harfiah implementasi berasal dari bahasa inggris "*Implemenation*" yang berarti pelaksanaan dan implementasi (Echolas dan Hasan sadily, 1992:312).

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa suatu kebijakan publik yang telah disyahkan, tidak akan bermanfaat apabila tidak dapat

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

diimplementasikan. Hal ini karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat bstrak kedalam realita nyata. Dengan kata lain pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil *(outcame)* yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran *(Target groups).*

Untuk menjamin suatu proses kebijakan berlangsung dengan baik diperlukan tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Jadi,implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusai, dana, sarana dan kemampuan organisasi baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap penting dalam proses kebijakan. Sebuah kebijakan hanya berupa tulisan kalau tanpa adanya implementasi. Di dalam implementasi pengalaman apapun betapa pahitnya merupakan input positif untuk meningkatkan kemampuan, kahlian dan keprofesionalan para pelaku kebijakan. Implementasi kebijakan mempunyai fungsi membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik yang diwujudkan dapat dicapai.

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut Howlett dan Ramesh

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

(1995: 154-153) yang merupakan ahli kebijakan menyatakan bahwa implemetasi kebijakan dipengaruhi oleh:

1. Pangkal tolak permasalahan, jika pangkal permasalahan itu jelas maka implementasi kebijakan publik berjalan dengan lancar. Artinya dengan mengenali apakah tolak itu berdominan sosial, politik, ekonomi ataupun budaya akan lebih memudahkan implementer dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut.
2. Tingkat keakutan masalah yang dihadapi pemerintah, semakin akut persoalan yang dihadapi kebijakan publik maka akan membutuhkan waktu penyelesaian implementasi kebijakan semakin lama dan pengorbanan sumber dayanya baik material maupun non material akan semakin banyak.
3. Ukuran kelompok yang ditargetkan, semakin kecil taget group yang dituju dari sebuah kebijakan publik tentunya akan semakin mudah dikelola dar pada kelompok target yang besar dan mempunyai lingkup yang luas.
4. Dampak perilaku yang diharapkan, jika dampak yang diinginkan semata-mata kuantitatif (ekonomis) maka akan lebih mudah menanganinya ketimbang dampak yang diinginkan merupakan perilaku seseorang. Selain berdimensi kualitatif dampak perilaku semacam ini membutuhkan waktu yang tidak pendek. (Howlett dan Ramesh 1995: 154-153)

Salah satu hal penting yang menjelaskan kesuksesan implementasi kebijakan adalah antara kebijakan dan implementasi harus disusun suatu korelasi yang jelas sehingga konsekuensi yang diinginkan pun jelas pula. Semakin kompleks kesinambungan kebijakan dapat dengan implemtasi maka semakin kompleks persoalan dan beban yang dihadapi di lapangan

. Menurut Widodo (2001:199) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain:

a. Komunikasi (*Communication*)
   Implementasi yang efektif sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan,dengan demikian komunikasi perlu dilakukan kepada para pelaksana *(Implementators*) secara konsisten dan akurat. Menurut Davis & Newtorm dikutip Taliziduhu Ndraha (1999: 161) komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, pesan atau konsep dari seseorang kepada orang lain.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

b. Sumber daya (*Resources*)
Factor sumber daya juga mempunyai peranan penting dalm implementasi kebijakan. Kerena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan efektif. Sumber daya adalah sumber-sumber yang digunakan untuk melaksanakan implemtasi kebijakan.

Sumber daya ini dipengaruhi oleh indikator-indikator sebagai berikut:

(1) Staf, dalam hal ini staf atau pelaksana kebijakan harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, perintah, anjuran dari pembuat kebijakan.
(2) Dana, dalam hal ini diperlukan dalam membiayai operasioanl implementasi kebijakan.
(3) Informasi, dalam arti bahwa informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan dan kerelaan serta kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.
(4) Kewenangan, diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang mereka kehendaki.
(5) Fasilitas, merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan.

c. Disposisi (*Disposition*)
Disposisi dalam implementasi kebijakan publik ini diartikan oleh Edward III (dikuktip widodo, 2001:203) sebagai kecenderungan,keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan jika ingin berhasil secara efektif dan efisien para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan itu.
d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratik Stucture*)
Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunnyai keinginan untuk melaksanakannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefesienan struktur birokrasi.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Menurut Grindle dalam Wibawa.

> “ implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut”.(Grindle dalam Wibawa 1994:12)

Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menyusun definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Implementasi kebijakan disini dapat dilihat dari :

1) Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya.Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. pabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu.Cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal.
2) Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

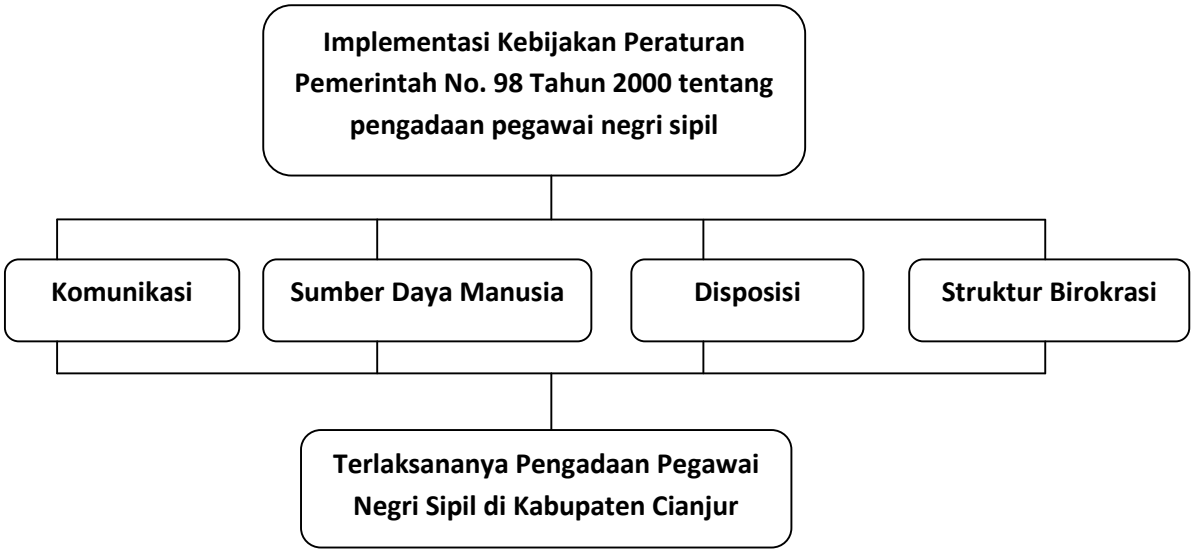
praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri dan organisasi.

3) Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando.

2. Kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.
3. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongnya formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil yang keluar karena berhenti atau adanya perluasan organisasi. Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode dalam Laporan KKL

Metode ini menggambarkan dan menjelaskan suatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Adapun pengertian dari metode penulis deskriptif menurut Soehartono bahwa :

> "Penulis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih" (Soehartono, 2002:35).

Ataupun metode penulis deskriptif menurut Surakhmad dapat diartikan sebagai berikut :

> "Penyelidikan deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja,

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing".(Surakhmad, 1998 : 139)

Dengan demikian metode deskriptif, mendata atau mengelompokan sederet unsur yang terlihat sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang ada. Informasi dari deskriptif dalam kegiatan ilmiah akan memperlihatkan bahwa jalan dari suatu fakta ilmiah adalah sebuah jalan yang sadar.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan tentang penerapan PP No. 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulis ini adalah

1. Kepustakaan

Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku, majalah, surat kabar, media teknologi informasi atau internet, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah Implementasi Kebijakan tentang Penerapan PP No.98 Tahun 2000.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

3. Observasi

Observasi yaitu melakukan penganatan atas perilaku seseorang dengan mendengarkan berbagai ucapan mengenai berbagai ragam soal pada aparatur pemerintahan.

1.6.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penulis ini adalah *Purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan) teknik ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. Menurut James A. Black teknik *sampling purposive* adalah

> "Teknik *sampling Purposive* adalah salah suatu cara yang diambil penulis untuk memastikan, bahwa unsur tertentu dimasukan ke dalam sampel. Tingginya tingkat selektivitas yang ada pada teknik ini akan menjamin semua tingkatan yang relevan direpresentasi dalam rancangan penulis tertentu". (Black, 1999 : 264).

Sampel purposive sering disebut sampel judgmental karena penulis menguji pertimbangan-pertimbangan untuk memasukan unsur yang dianggap khusus dari suatu populasi tempat ia mencari informasi. Informan dalam penulis ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelola data di BKPPD.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Menurut Patton, 1980 (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data,

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, (1975: 79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesiskan menjadi: Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita menarik garis bawah analisis data bermaksud pertama- tama mengorganisasikanm data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar penulis, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Akhirnya perlu dikemukakan bahwa analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakjan secara

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

intensif, yaitu sudah meninggalkan lapangan. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga, pikiran penulis. Selain menganalisis data. Penulis juga perlu dan masih perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasikan teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori baru yang barangkali ditemukan.

Teknik analisa data yang sesuai dengan penulis ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Penulis kuallitatif dapat diartikan sebagia strategi pendidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana *(setting)* tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar (*grounded*) dalam data (Suyatna, 2005:183).

Analisi data yang digunakan dalam penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna sesuatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Secara operasional teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model analisis data.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penulisan laporan ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberiakn gambaran yang lebih jelas, mempermudah penulis unutuk

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang sering digunakan untuk menyajikan data dalm penulis kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

   Kesimpulan dalam penulis kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setalah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dengan demikian kesimpulan dalam penulis kualitatif mungkin dapt menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penulis kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penulis berada di lapangan.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Laporan penulis kualitatif dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, reliabilitas, dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.

1.7 Lokasi dan Jadwal Laporan KKL

a. Lokasi KKL

Lokasi kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cianjur, tepatnya di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Jl. Siti Jenab No.31 Cianjur 43211 Telp. (0263) 261892.

b. Waktu Pelaksanaan KKL

Pelaksanaaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dari tanggal 1 sampai dengan 30 Agustus 2010.

Tabel 1.1
Jadwal Kuliah Kerja Lapangan

NO	Uraian kegiatan	Tahun 2010				
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1	Tahap Persiapan: a. Pengajuan Judul Laporan KKL	■				
	b. Pengajuan Usulan Laporan KKL	■				
	c. Pengajuan Surat ke Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat	■				
2	Tahap Pelaksanaaan KKL		■			
3	Tahap Akhir: a. Penulisan Laporan KKL			■	■	■
	b. Pengumpulan Laporan KKL					■

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com